



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU TAHUN 2023



<https://kec-pangkalan.limapuluhkotakab.go.id>



pangkalan.kotobaru@gmail.com



[kec.pangkalankotobaru](https://www.instagram.com/kec.pangkalankotobaru)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021- 2026.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023.

Kami menyadari dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini masih jauh dari kesempurnaan, baik di dalam proses perumusan ataupun penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan sumbang saran dan koreksi dari semua pihak yang terkait, guna penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini.

Pangkalan, September 2023

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU


GUSNI HENDRIX, S.STP,MPA
NIP. 19790831 199810 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	11
	1.3 Maksud dan Tujuan	12
	1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023	14
	2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Triwulan I dan II Tahun 2023	14
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru	24
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
	3.1 Indikator Kinerja	28
	3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	30
BAB IV	: PENUTUP	37

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan	
1.1	Pangkalan Koto Baru Tahun 2024	4
	.	
Tabel	Formulir E.81	
2.1	Evaluasi terhadap Hasil Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Periode Pelaksanaan 2023	16
Tabel	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	21
2.2		
Tabel	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	27
2.4		
Tabel	Rencana Target Kinerja IKU Kecamatan Pangkalan Koto Baru	29
3.1		
Tabel	Perubahan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	31
3.2		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimana Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja PD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan Renja PD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD 2021-2026.

Renja yang disusun setiap tahunnya dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Pada ayat (4) nya dinyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan Renja Tahun 2023 disusun mulai dari tahapan penyusunan rancangan perubahan Renja, selanjutnya rancangan akhir perubahan Renja dan terakhir penetapan perubahan Renja. Penyusunan rancangan perubahan Renja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai triwulan II tahun berjalan. Sampai saat ini telah terjadi Pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2023 sebanyak 3 kali sebelum semester I pelaksanaan APBD berakhir. Pergeseran anggaran pada APBD ini turut melatarbelakangi dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2023.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023, Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Perumusan Perubahan Rencana Kerja Lareh Sago Halaban dan
3. Penetapan

1. **Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja**

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: a. Rancangan Perubahan RKPD; dan b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Berikut agenda penyusunan renja:

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																															
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
A	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023																																												
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																												
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																												
3	Orientasi mengenai Renja Kecamatan Harau																																												

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																															
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																												
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023																																												
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2022																																												
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																												
C	Penyusunan Rancangan Renja																																												
1	Penyusunan Rancangan Renja																																												

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana kerjaan dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup

2. **Perumusan Rencana Kerja**

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup: a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. **Penetapan**

Dalam hal penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 39).
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Pangkalan Koto Baru secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan seksi-seksi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan sebagainya.
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- IV. Penutup
Berisi ketentuan penutup.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan

pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel E-81

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	150	97.137.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	66	45.837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi TPP dan SKP	84	51.300.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	259	655.579.950	40.441.050	36	25.547.900	3	2.775.500	2	3.825.000	-	-	-	5	6.600.500	5	47.041.550	7%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	36	7.221.811	321.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.000	-	4%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer	7	115.734.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	72	77.156.100	5.538.000	12	6.510.000	3	1.245.500	-	-	-	-	-	3	1.245.500	3	6.783.500	9%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	72	65.582.685	4.150.000	12	3.477.900	3	430.000	-	-	-	-	-	3	430.000	3	4.580.000	7%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	72	389.885.204	30.432.050	12	15.560.000	3	1.100.000	2	3.825.000	-	-	-	5	4.925.000	5	35.357.050	9%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	13	320.415.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	5	141.027.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan	8	179.387.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.164	682.367.005	75.738.422	36	47.870.632	4	3.302.745	6	18.096.127	-	-	-	10	21.398.872	10	97.137.294	14%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000	1.020	9.027.264	720.000	12	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.000	-	8%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	72	201.531.733	13.612.985	12	10.720.700	3	2.824.245	3	1.096.127	-	-	-	6	3.920.372	6	17.533.357	9%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 5 (lima) orang	72	471.808.008	61.405.437	12	37.029.932	1	478.500	3	17.000.000	-	-	-	4	17.478.500	4	78.883.937	17%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	95	682.631.175	57.183.250	12	45.790.000	3	10.900.000	3	6.805.950	-	-	-	6	17.705.950	6	74.889.200	11%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	66	560.153.286	57.183.250	12	45.790.000	3	10.900.000	3	6.805.950	-	-	-	6	17.705.950	6	74.889.200	13%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop	24	31.634.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	5	90.843.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8.024	456.805.004	62.003.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.003.437	-	14%	Kec. Pangkalan Koto Baru	

1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.012	62.820.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.012	62.820.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.012	393.984.508	62.003.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.003.437	-	16%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	4.012	393.984.508	62.003.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.003.437	-	16%	Kec. Pangkalan Koto Baru
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.140	429.306.354	56.850.000	46	7.010.000	40	4.735.000	-	-	-	-	-	-	40	4.735.000	40	61.585.000	14%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan	1.140	429.306.354	56.850.000	40	4.735.000	40	4.735.000	-	-	-	-	-	-	40	4.735.000	40	61.585.000	14%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	240	95.743.005	3.130.000	40	4.735.000	40	4.735.000	-	-	-	-	-	-	40	4.735.000	40	7.865.000	8%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	900	333.563.349	53.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.720.000	-	16%	Kec. Pangkalan Koto Baru
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	6	2.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Terlaksananya Program dan kegiatan PKK	-	-	-	6	2.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Kec. Pangkalan Koto Baru
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	15	97.466.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5	61.446.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	5	61.446.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	36.020.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	10	36.020.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36	37.397.562	-	6	33.000.000	-	-	3	8.250.000	-	-	-	-	3	8.250.000	3	8.250.000	22%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36	37.397.562	-	6	33.000.000	-	-	3	8.250.000	-	-	-	-	3	8.250.000	3	8.250.000	22%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	36	37.397.562	-	6	33.000.000	-	-	3	8.250.000	-	-	-	-	3	8.250.000	3	8.250.000	22%	Kec. Pangkalan Koto Baru

VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	258	1.261.943.074	21.687.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.687.500	2%	Kec. Pangkalan Koto Baru
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu	258	1.261.943.074	21.687.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.687.500	2%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	30	45.825.491																-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	36	127.461.877	7.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.071.000	6%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	6	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum	36	268.256.329	7.087.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.087.000	3%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	6	152.441.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi	72	91.908.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	72	276.049.095	7.529.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.529.500	3%	Kec. Pangkalan Koto Baru
	JUMLAH		11.382	16.292.535.557	1.493.536.842	148	1.159.853.200	53	219.770.640	16	319.038.684	0	0	0	0	69	538.809.324	69	2.032.346.166	12%	Kec. Pangkalan Koto Baru	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			46			
Predikat Kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya																						

Pangkalan, Juni 2023
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

GUSNI HENDRIX, S.STP,MPA
NIP.19790831 199810 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7	8	11	12	13	14	17
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	Hasil Review Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	64	65	70	61,34		63	64	
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Lembaga Yang Aktif/Jumlah Total Lembaga	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65%	70%	70%	80%	70%	75%	80%	80%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004 tentang survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,04	96,05	96,10	96,20	90,85	90,89	91	91	

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2022 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

2.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

2.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

2.2.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
- ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - ✓ Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- D. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut.
- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan sebagai berikut :
- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan program/ kegiatan tersebut nampak masih banyak kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang

berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2022 sudah memenuhi target, yakni 90 %.

Oleh karena PD Kecamatan Pangkalan Koto Baru bukan merupakan PD yang menanggapi urusan wajib pelayanan dasar, maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pada Bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru terhadap Masyarakat.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan SDGs (Sustainable Development Goals).
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru .
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.
1. Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Berdasarkan analisis gambaran Tupoksi Camat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

2. Permasalahan dan hambatan menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah PD Kecamatan Pangkalan Koto Baru antara lain :

- a. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

- b. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup beberapa OPD yang menjadi sampel dari OPD yang ada dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak termasuk OPD yang dinilai.
 - c. Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - d. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu
 - e. Belum Optimalnya Perkembangan Bumrag Nagari.
3. Permasalahan dan Hambatan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai OPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - a. Lokasi geografis yang berbukit, Luas Wilayah dan dan jumlah sebaran Penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - b. Peluang untuk meningkatkan realisasi jumlah masyarakat yang akan terlayani dalam pengurusan administrasi Kecamatan.
 - c. Perbaikan kinerja SDM Kecamatan yang didukung dengan anggaran dan sarana /prasarana yang tersedia.
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021:
 1. Melakukan pelayanan di Kantor Camat dengan mengumpulkan seluruh bahan administrasi kependudukan dan akan secara berkala mengajukan pengurusannya ke kantor Catatan Sipil dan akan di konfirmasi kepada masyarakat yang melakukan pengurusan setelah selesai dokumen kependudukan selesai.
 2. Tetap melakukan penyusunan SAKIP dengan benar, sesuai dengan peraturang yang ada dan tepat waktu.
 3. Nilai pengukuran IKM telah baik dan akan dilakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

4. Lebih Mengintensifkan monitoring dan pembinaan ke Nagari untuk peningkatan Status Nagari yang Masih Berkembang menjadi Maju dan realisasi penetapan APB Nagari tepat waktu.
5. Lebih mendorong perkembangan BUMNAG yang belum berkembang dan melakukan pembinaan Bumrag yang aktif agar lebih maju.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2022 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari dan Kecamatan akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah diakomodir dalam Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 tidak ada penjelasannya.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
	N	I	H	I	L

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan Strategi dan Kebijakan yang terintegrasi tidak terpisahkan, Strategi dan kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi terdiri dari:
 - a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan
 - b. Peningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik.
 - c. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik
 - d. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)
 - e. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.

2. Kebijakan terdiri dari:
 - a. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis
 - b. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .
 - c. Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
 - d. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
 - e. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
 - f. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
 - g. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
 - h. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari
 - i. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari
 - j. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat.

Rencana Target Kinerja IKU Kecamatan Pangkalan Koto Baru

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	64	100	IKU PD
2	Meningkatnya aktifitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	40%	60%	IKU PD
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	IKU PD

Dari tabel target kinerja IKU diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 64 yaitu dari target yang di rencanakan adalah 64 dengan realisasi 0 Dokumen hal ini dikarenakan :

1. Penilaian SAKIP untuk Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum dikeluarkan oleh inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Penilaian hanya berfokus pada target peningkatan Capaian nilai SAKIP.

f. Indikator Kinerja 2

Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 75% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 70% dengan realisasi 75% hal ini dikarenakan :

1. Masih banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak aktif
2. Kurangnya anggaran untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dikecamatan

g. Indikator Kinerja 3

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 90,89% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 96,05 dengan realisasi 90,89 %hal ini dikarenakan :

3. Realisasi survei IKM sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dari Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan terhadap Masyarakat untuk pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan dengan optimal.
5. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan terus ditingkatkan dengan anggaran yang tersedia.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk Tahun 2023 Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam mengemban tugas. Adapun uraian rencana sub kegiatan dan pendanaan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai beriku

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat PD, Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh PD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga menyusun dan menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023. Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya

manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pangkalan, September 2023

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



GUSNI HENDRIX, S.STP,MPA

NIP. 19790831 199810 1 001